

Media Online	Rakyat Sulsel
Tanggal	Senin, 28 Juli 2025
Wilayah	Provinsi Sulawesi Selatan



Aset Negara Rp2,4 Triliun di CPI Tak Kunjung Diserahkan, DPRD Sulsel Siap Gulirkan Hak Angket



MAKASSAR, RAKYATSULSEL — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan bergerak menyelamatkan aset negara berupa lahan seluas 12,1 hektare di kawasan reklamasi Center Point of Indonesia (CPI), yang hingga kini belum diserahkan oleh pihak pengembang, PT Yasmin Bumi Asri, kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel. Padahal, lahan tersebut merupakan bagian dari kompensasi atas izin reklamasi yang diberikan kepada pihak swasta. Nilai asetnya ditaksir mencapai Rp2,4 triliun, namun hingga batas waktu yang telah ditentukan, pengembang belum juga menyerahkannya. Wakil Ketua DPRD Sulsel, Fauzi Andi Wawo, mengaku kecewa atas lambannya penyelesaian persoalan tersebut. Ia menyebut pengajuan hak angket menjadi langkah konstitusional untuk menuntaskan polemik yang telah berlangsung bertahun-tahun ini. “Dengan mengajukan hak angket, prioritasnya adalah menyelamatkan aset milik pemerintah provinsi berupa lahan 12,1 hektare di kawasan reklamasi CPI,” ujar politisi yang akrab disapa Bang Uci, Minggu (27/7/2025).

Fauzi menegaskan, pihak pengembang—dalam hal ini PT Yasmin Bumi Asri—merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas belum diserahkannya lahan tersebut ke Pemprov. “Ini selalu menjadi rekomendasi DPRD setiap tahunnya dalam Laporan Pertanggungjawaban Gubernur terhadap penggunaan APBD. Tapi sampai hari ini belum ada kejelasan,” tegas Ketua DPC PKB Makassar itu. Menurutnya, DPRD perlu menegakkan kewenangan dan fungsi pengawasan demi menjaga marwah Pemerintah Provinsi Sulsel. Ia pun mengakui bahwa wacana penggunaan hak angket sudah memenuhi syarat secara formal. “Secara aturan, hak angket sudah bisa bergulir karena sudah ditandatangani oleh lebih dari dua fraksi,” bebernya. Langkah DPRD ini diharapkan menjadi titik balik dalam mendorong pengembalian aset negara yang tertahan di tangan pihak swasta. Hak angket akan menjadi instrumen politik untuk mengungkap secara terbuka alasan di balik mandeknya penyerahan lahan dan siapa saja pihak yang bertanggung jawab. (*)